

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD) TA 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

1. **OPD Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
Urusan yang Melaksanakan :
 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Forum Penegakan Perda
 - Operasi PAM Balimau Paga
 - Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
 - Operasi Pengamanan Tour The Singkarak
 - Operasi PAM Lebaran
6. Program Penanganan Tanggap Darurat
 - Operasi Pemadam Kebakaran

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 Kegiatan dengan realisasi sebesar 96,19%
Capaiannya .
 - a) Terpenuhinya Pelayanan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik selama 12 bulan
 - b) Terpenuhinya Jasa Adminstrasi Keuangan selama 12 bulan
 - c) Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan
 - d) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan
 - e) Tersedianya Kelengkapan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
 - f) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
 - g) Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan kantor
 - h) Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
 - j) Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - k) Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi sebesar 87,59%
 - a) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
 - b) Terpenuhinya Rutin/ berkala gedung kantor
 - c) Tersedianya Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari dari 1 Kegiatan dengan realisasi sebesar 98,98%
 - a. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Peningkatan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi sebesar 98,64%
 - a) Tersedianya Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ini terdiri dari 5 kegiatan dengan realisasi 90,49%

- a) Tersedianya Forum Penegakan Perda
- b) Terlaksananya Operasional PAM Balimau Paga
- c) Terlaksananya Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
- d) Terlaksananya Operasi Pengamanan Tour The Singkarak
- e) Terlaksananya Operasi Pam Lebaran

6. Program Penanganan Tanggap Darurat

Program Penanganan Tanggap Darurat ini terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi 99,15%

- 1) Operasi Pemadam Kebakaran

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah melalui usulan dari Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Musrenbang.

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang program dan kegiatan belum cukup memadai (masih kurang)

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

1. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan menuntut pengawasan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih maksimal;
2. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting ketentraman dan ketertiban umum, dan lebih cenderung mengedepankan arogansi dalam menjalankan tatanan kehidupan sosial, sehingga hal ini sedikit banyaknya akan menimbulkan gesekan yang bersifat horizontal;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang belum tersedia cukup untuk penyelenggaraan operasionalisasi baik berupa patroli rutin maupun operasi penegakan aturan yang ditetapkan dalam standar pelayanan manusia;

4. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai untuk operasionalisasi penugasan personil ke lapangan sehingga sedikit banyaknya memperlambat pergerakan personil pada titik – titik yang telah direncanakan untuk operasi;
5. Minimnya kuantitas ketersediaan personil jika dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus diawasi dikarenakan posisi kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah penyangga ibukota;
6. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kurang memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menghadapi tuntutan sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum.

2. Solusi :

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan beberapa kendala tersebut adalah.

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Satpol pp tingkat kecamatan, sehingga lebih maksimalnya kinerja Anggota Satpol PP Pesisir Selatan dilapangan.
2. Perlunya lebih intens sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memaksimalkan kondisi yang ada secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik dengan OPD terkait, sehingga pelaksanaan tugas-tugas operasional yang melibatkan personil dan menjadi tugas OPD terkait, apabila dimintakan bantuan personil Satpol PP, perjalanan dinas anggota menjadi tanggungjawab OPD tersebut.
4. Perlunya kendaraan patroli yang handal dilapangan mengingat banyaknya medan berat di lalui dilapangan untuk kelancaran mobilisasi Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5. Perlunya Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan.
6. Memaksimalkan kuantitas anggota yang dimiliki dan apabila ada perekrutan anggota harus sesuai dengan standarisasi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
7. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan anggota Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan fisik dan kesamaptaaan serta pelatihan teknis fungsional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan.

E. Hal-hal yang perlu dilaporkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari perubahan tersebut, sebagai berikut:

1. **Penegakkan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah sebagai instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibuat dengan tujuan menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan (medebewind) dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Artinya berfungsi mengatur kehidupan warganya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya,

- a. Penertiban terhadap warung remang-remang yang sering diidentikkan dengan keberadaan wanita penghibur atau PSK. Hal ini merupakan salah satu potensi gangguan terhadap kenyamanan masyarakat karena bertentangan dengan norma agama, adat dan kesopanan (budaya timur).
- b. Penertiban terhadap hewan /ternak lepas di jalan raya atau fasilitas umum bertujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Penertiban penambangan tanpa ijin atas bahan galian C bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana alam.

2. **Pelaksanaan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Keberadaan aparat Linmas di Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting sekali, mengingat wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat rawan terhadap bencana alam, seperti gelombang tsunami, gempa bumi, banjir dan tanah longsor serta penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Keberadaan Satlinmas pada masing – masing nagari merupakan hal mutlak yang nantinya akan menjadi perpanjangan tangan Satpol PP di wilayah paling kecil. Satlinmas masing – masing nagari beranggotaan 12 orang yang terdiri dari 5 (lima) regu dan akan menjalankan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP Satlinmas itu sendiri.

SDM Pendukung Program dan Kegiatan ,

DATA APARATUR SIPIL NEGARA

DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Kualifikasi Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Terakhir						Jenis Kelamin				Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)					
		SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
	Struktural																				
1	Eselon II.b																				
2	Eselon III.a					V			V										V	V	
3	Eselon III.b				V				V												V
4	Eselon IV.a		V		V				V												V
5	Staf		V		V				V												V

Lampiran III.1

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KET
KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Personil Safpol PP dan pemadam Kebakaran (Kebijakan Ketersediaan aparat Transibum)	Rasio personil Safpol PP dan Pemadam Kebakaran terhadap jumlah penduduk	Jumlah Personil Safpol PP dan Pemadam Kebakaran pada Akhir tahun 2018 dibagi 10.000 Penduduk x 100%	Personil Safpol PP dan Damkar (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak 46 Orang Jumlah Penduduk Pessel tahun 2018 sebanyak 393.428 jiwa/orang	0,46%	Jumlah Penduduk (data Dinas Duk dan Capil)
TEROBOSAN/ INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima Pemda tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Penghargaan di terima sebanyak 1 yang terdiri dari : 1. Safpol PP berprestasi Tingkat Sumatera Barat An. Edison, SH	-	

Safpol PP dan Damkar (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Hubungan antar daerah	Hubungan antar daerah atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	NIHIL	
13	TEROBOSAN/ INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2018	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2018	NIHIL	

LAMPIRAN III.1

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN PESIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN¹,

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/L 1 PND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD Keberadaan Standard Operating Procedure	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 % Ada 78 SOP	

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPKN terkait.

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	(SOP)		1. SOP tfg Pengurusan Penerimaan Laporan Kegiatan Satpol PP Daerah 2. SOP tfg Pengurusan Pengajuan Izin Peminjaman Kendaraan 3. SOP tfg Pengurusan Pengiriman Peserta Diklat 4. SOP tfg Pengurusan Penilaian Pegawai 5. SOP tfg Pengurusan Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat 6. SOP tfg Pengurusan Kartu Pegawai 7. SOP tfg Pengurusan Kartu Istri atau Suami 8. SOP tfg Pengurusan Penyusunan Kegiatan SOP		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					9. SOP ttg Pengurusan Penyusunan Renja		
					10. SOP ttg Pengurusan Penyusunan Anggaran		
					11. SOP ttg Pengurusan Penyusunan LAKIP		
					12. SOP ttg Pengurusan Permohonan Pemakaian Ruang Rapat		
					13. SOP ttg Pengurusan Penerbitan Izin Belajar Pegawai		
					14. SOP ttg Pertanggungjawaban Dama TU		
					15. SOP ttg Permintaan Peserta Pelatihan		
					16. SOP ttg Permintaan Narasumber Kegiatan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					17. SOP ttg Penyusunan SK Panitia Pelaksanaan Kegiatan		
					18. SOP ttg Penyusunan Proposal Kegiatan		
					19. SOP ttg Penyusunan Perencanaan Anggaran		
					20. SOP ttg Penyusunan Peraturan Bupati		
					21. SOP ttg Penyusunan Laporan Keuangan		
					22. SOP ttg Penyusunan Dokumen SFJ Bendahara Pengeluaran		
					23. SOP ttg Penyidikan Pelanggaran Disiplin		
					24. SOP ttg Penyampaian Realisasi Fisik Kegiatan Dan Keuangan Perbulan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					25. SOP ttg Penunjuk Petugas Pengamanan Dan Pengawalan		
					26. SOP ttg Pengurusan Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor		
					27. SOP ttg Pengurusan Pembantu Bendahara		
					28. SOP ttg Pencatatan SPJ Bendahara Pengeluaran		
					29. SOP ttg Pencatatan Transaksi Pada BKU		
					30. SOP ttg Pencatatan Penerimaan Pengeluaran Pajak Pada Buku Pajak		
					31. SOP ttg Pencairan Dana Tambah UANG (TU)		
					32. SOP ttg Pencairan Dana Kegiatan Langsung		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					33. SOP tfg Pencairan Ganti Uang (GU)		
					34. SOP tfg Pembayaran Uang Makan Dan Minum Anggota Piket		
					35. SOP tfg Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada)		
					36. SOP tfg Pembayaran Gaji Pegawai		
					37. SOP tfg Pembayaran Dana UP, GU Dan TU		
					38. SOP tfg Pelaksanaan Rapat		
					39. SOP tfg Pelaksanaan Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan		
					40. SOP tfg Pelaksanaan Pengawalan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					Operasi Gabungan SOP tfg Pengurusan Surat Masuk		
					52. SOP tfg Pengurusan Surat Keluar		
					53. SOP tfg Pengurusan Perencanaan Kebutuhan Barang dan Perlengkapan		
					54. SOP tfg Pengurusan Pengadaan Barang Inventaris		
					55. SOP tfg Pengurusan Pemakaian Barang		
					56. SOP tfg Pengurusan Penghapusan Aset		
					57. SOP tfg Pengurusan Pengajuan Perawatan Peralatan		
					58. SOP tfg Pengurusan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPALAN KINERJA	KETERANGAN
					Pengidentifikasian Asset Satpol PP		
					59. SOP ttg Pengurusan Penerbitan Aset		
					60. SOP ttg Pengurusan Penerbitan Aset		
					61. SOP ttg Pengurusan Penginventarisir Barang Habis Pakai		
					62. SOP ttg Pengurusan Pengisian DP3 Pegawai		
					63. SOP ttg Pengurusan Pengumpulan Data Aset		
					64. SOP ttg Pengurusan DUK		
					65. SOP ttg Pengurusan Penyusunan Formasi Pegawai		
					66. SOP ttg Pengurusan Kenaikan Pangkat		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					67. SOP ttg Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala		
					68. SOP ttg Pengurusan Kenaikan Pangkat Pengabdian		
					69. SOP ttg Pengurusan Mutasi Ahli Tugas PNS dilingkungan Satpol PP		
					70. SOP ttg Pengurusan Pelaksanaan Rapat		
					71. SOP ttg Pengurusan Pembinaan ke Daerah		
					72. SOP ttg Pengurusan Pencairan Dana		
					73. SOP ttg Pengurusan Pencantuman Gelar PNS		
					74. SOP ttg Pengurusan Pendistribusian Pegawai Baru		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut	Jumlah pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	75. SOP ftg Pengurusan Pengajuan Cuti Pegawai 76. SOP ftg Pengurusan Pengajuan Nota Dinas 77. SOP ftg Pengurusan Pengajuan Surat Tugas Dalam Propinsi 78. SOP ftg Pengurusan Pengajuan Surat Tugas Luar Propinsi	0 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			PERMEN				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH		Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada sebanyak 6 -Jabatan yang harus ada, sebanyak 6	100 %	
		Pengisian struktur jabatan	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: 1. Danton 2. Dauru 3. PKD	Ada	
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	-PNS SKPD , sebanyak 32 personil -Total PNS Kabupaten,	0,37 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		menyeleenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total kepengimpin pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	sebanyak 8.569 personil -Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. -Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.	50 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 6 org. -Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan	9	Keberadaan dokumen perencanaan	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 4	Ada 4 jenis dokumen	

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	10	berikut jumlahnya	jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	-Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. -Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi	-Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. -Program dalam RKA SKPD,	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		RENJA SKPD	diakomodir dalam RKA SKPD x SKPD	jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	sebanyak 6 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program diakomodir dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program diakomodir dalam DPA SKPD x 100%	-Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. -Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	-Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.083.350.441,65,- -Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.763.392.460.796,-	0,002 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	-Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 21.500.000,- -Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.083.350.441,65,-	0 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KUALITA	REVISI/REVISI
15	Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	-Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- -Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.061.850.441,65,-	0 %		
16	Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbh. 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Fungsional	Ada sebanyak 5 jenis		

NO	ASPEK	FOKUS	NO IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	5. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Apabila Ada, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIB 2. Kartu Persediaan Barang 3. Daftar Mutasi Aset 4. Buku Inventaris	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.888.328.884,- asset.	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI	Bentuk-bentuk	20	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi		Jumlah sebanyak 4 jenis.	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat		prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengumuman 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengumuman 3. Pengumuman di Mass Media 4. Spanduk		
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21		Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan Fungsi Penunjang Lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
7. Permasalahan dan Solusi
8. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Painan, 17 Januari 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DAILIPAL, S.Sos.M.S.i

NIP. 196805 199009 1 001